

PERAN MAJALAH SUARA MUHAMMADIYAH DALAM PERJUANGAN POLITIK MUHAMMADIYAH TAHUN 1965-1985

Oleh: Fara Famular, Prodi Ilmu Sejarah, Jurusan Pendidikan Sejarah, Fakultas Ilmu Sosial, Universitas Negeri Yogyakarta, dwarawati1010@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini diorientasikan untuk menganalisis posisi Majalah Suara Muhammadiyah dalam melaksanakan pembinaan dan menyuarakan perjuangan politik Muhammadiyah dan dampaknya terhadap organisasi. Penelitian ini bertujuan menjelaskan kecenderungan Muhammadiyah memainkan perannya dalam merespons kondisi politik sosial bangsa. Dengan mengumpulkan bahan dari berbagai sumber, penelitian ini mencoba menjawab latar belakang berdiri dan perkembangan Majalah *Suara Muhammadiyah*, perjuangan politik Muhammadiyah dalam Majalah *Suara Muhammadiyah* 1965-1985, dan dampak keterlibatan Muhammadiyah dalam politik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Majalah *Suara Muhammadiyah* lahir sebagai perwujudan kesadaran K. H. Ahmad Dahlan akan pentingnya dakwah melalui media pers (dakwah *bil qalam*). Majalah *Suara Muhammadiyah* memasuki fase baru dan kebangkitan sejalan dengan perjuangan politik Muhammadiyah yang tercermin dalam tiga peristiwa. Pertama (1965-1967), pengakuan Muhammadiyah sebagai Organisasi Kemasyarakatan yang memiliki fungsi politik riil. Kedua (1968-1969), lahirnya Parmusi sebagai wadah politik umat Islam yang diprakarsai Muhammadiyah agar bisa lebih memantapkan tugas dakwah Islamiyah. Ketiga (1970-1985), lahirnya tiga rumusan *Khittah* perjuangan Muhammadiyah yaitu *khittah* Ponorogo, Ujung Pandang, dan Surabaya yang menegaskan posisi dan sikap Muhammadiyah untuk tidak berpihak kepada kepentingan politik praktis dan tidak memiliki keberpihakan terhadap semua partai politik. Keterlibatan Muhammadiyah dalam politik yang demikian ini, pada perkembangannya membawa dampak negatif baik pada konteks jangka pendek maupun jangka panjang. Pertama, mundurnya dakwah Muhammadiyah yang bersifat sosial kemasyarakatan dan keagamaan, khususnya dakwah Islamiyah. Kedua, muncul friksi-friksi keras di tubuh organisasi akibat pertentangan pendapat dan sikap politik, yang berakibat pada keretakan gerakan dan kepemimpinan. Ketiga, sikap netral Muhammadiyah dalam berpolitik.

Kata Kunci: Muhammadiyah, Politik, Majalah Suara Muhammadiyah

THE ROLE OF SUARA MUHAMMADIYAH MAGAZINE IN THE POLITICAL STRUGGLE OF MUHAMMADIYAH 1965-1985

Abstract

This research is oriented to analyze the position of Suara Muhammadiyah Magazine in carrying out guidance and voice the political struggle of Muhammadiyah and its impact on organization. This research to explain Muhammadiyah's tendency to play its role in responding to the social and political conditions of the nation. By collecting material from various sources, this research tries to answer the background of the stand and development of Suara Muhammadiyah Magazine, Muhammadiyah's political struggle in Suara Muhammadiyah Magazine 1965-1985, and the impact of Muhammadiyah's involvement in politics. The results of this study show that the Suara Muhammadiyah Magazine was born as a manifestation of consciousness K. H. Ahmad Dahlan's awareness of the importance of da'wah through media releases (dakwah bil qalam). Suara Muhammadiyah Magazine entered a new phase and resurrection in line with Muhammadiyah's political struggle reflected in three events. First (1965-1967), recognition of Muhammadiyah as a Social Organization that has a real political function. Second (1968-1969), the birth of Parmusi as a political forum of Muslims initiated by Muhammadiyah in order to further solidify the task of Islamic da'wah. Third (1970-1985), the birth of the three the formulation of the Khittah Muhammadiyah struggle that Khittah Ponorogo, Ujung Pandang, and Surabaya affirmations the position and attitude of Muhammadiyah not to take the side of practical political interests and have no alignment to all political parties. Muhammadiyah's involvement in such politics, in its development, has had a negative impact on both the short-term and the long-term context. First, the retreat of the Muhammadiyah mission that is social and religious, especially Islamic da'wah. Second, there arose tough frictions in the organizational body due to conflict of opinion and political attitudes, which resulted in the rift of movement and leadership. Third, the neutral attitude of Muhammadiyah in politics.

Keywords: Muhammadiyah, Politics, Suara Muhammadiyah Magazine

PENDAHULUAN

Muhammadiyah sejak awal berdirinya pada 18 November 1912¹ merupakan organisasi pembaharuan Islam yang melaksanakan dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dengan menggunakan berbagai media (sarana) dakwah. Salah satu media dakwah yang digunakan Muhammadiyah adalah media dakwah *bil qalam* (media cetak/pers) berupa majalah.² Muhammadiyah sangat menyadari betapa pentingnya media tertulis berupa buku, brosur, dan pers (majalah dan surat kabar) bagi kepentingan organisasi dan dakwah. Pada 1915, tiga tahun setelah didirikannya Muhammadiyah, atas prakarsa K. H. Ahmad Dahlan dengan inisiatornya H. Fachrudin, diterbitkan media pers berupa majalah *Suara Muhammadiyah*.³

Memasuki masa kemerdekaan, *Suara Muhammadiyah* mulai menampilkan pandangan dan sikap Muhammadiyah terkait politik Islam. Hal ini terjadi sebagai respons Muhammadiyah atas imbauan pemerintah untuk mendirikan partai politik melalui pengumuman 3 Oktober 1945.⁴ Muhammadiyah yang sangat memahami kedudukannya sebagai bagian dari perjuangan umat Islam, berusaha tidak boleh dan tidak akan mengelakkan diri dari masalah politik. Hal ini sesuai dengan pandangan politik Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah memposisikan politik sebagai bagian integral ajaran Islam dan berfungsi sebagai instrumen meraih cita-citanya, yaitu masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.

Pergolakan politik yang terjadi di Indonesia pasca kemerdekaan hingga 1960, muncul pemikiran dalam Muhammadiyah untuk meningkatkan mutu *Suara Muhammadiyah* secara besar-besaran baik mengenai pimpinan, kualitas penerbitan, dan isinya. Reorganisasi *Suara Muhammadiyah* dilaksanakan pada 1965 dengan istilah "Wajah dan Gaya Baru". Dalam pelaksanaannya *Suara Muhammadiyah* menempuh banyak usaha, ciri yang menonjol adalah usaha mewujudkan cita-cita politiknya dengan meningkatkan

fungsinya untuk memberikan dukungan *social support* dan *social control* kepada segala kegiatan, baik yang dilakukan pemerintah (militer dan sipil) maupun masyarakat pada umumnya.⁵ Ciri lain yang jelas menonjol adalah menghadapi situasi baru menjelang dan setelah terjadi percobaan *coup* dan terror dari G30S/PKI yang didalangi dan dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan segala epilognya.

Periode 1965 ini menjadi fase baru dan kebangkitan *Suara Muhammadiyah*. Hal ini sejalan dengan strategi politik Muhammadiyah yang tercermin dalam tiga peristiwa.⁶ Pertama, pengakuan wajah ganda Muhammadiyah oleh pemerintahan saat itu, yaitu Muhammadiyah sebagai organisasi kemasyarakatan sekaligus berfungsi organisasi massa politik. Pengakuan ini terjadi pada akhir pemerintahan Orde Lama 5 Januari 1966, dan dikukuhkan dengan tiga surat pada awal pemerintahan Orde Baru. Kedua, lahirnya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) yang dibidani Muhammadiyah untuk melahirkan partai politik Islam setelah kegagalan rehabilitasi Partai Masyumi. Ketiga, rumusan *Khittah* Ponorogo⁷, *Khittah* Ujung Pandang dan *Khittah* Surabaya yang memutuskan kebijakan strategi perjuangan Muhammadiyah dengan menegaskan bahwa cita-cita perjuangan Muhammadiyah hanya bisa diwujudkan dengan kembali pada prinsip Muhammadiyah. Maka Muhammadiyah memposisikan kedudukan dan sikapnya yang tidak berpihak kepada kepentingan politik praktis dan tidak berhubungan organisatoris dengan semua partai politik.

Maka jelaslah bahwa usaha-usaha perbaikan dalam *Suara Muhammadiyah* menunjukkan kesadaran Muhammadiyah akan pentingnya dakwah melalui sebuah media cetak. Untuk itu, terdapat beberapa alasan mengapa media massa dalam bentuk majalah, khususnya *Suara Muhammadiyah* menarik untuk diteliti. *Pertama*, fungsi pers *Suara Muhammadiyah* yang sesuai dalam Undang-Undang Pers Pasal⁸ yaitu

¹PP Muhammadiyah, *Surat Pemberitahuan Tentang Keberadaan Organisasi Muhammadiyah : Data Organisasi Kemasyarakatan No. A/6-266/1987*.

²H. Ahmad Basuni, "Pers Usaha Muhammadiyah : KHA Dahlan Prakarsai Terbitkan Suara Muhammadiyah", *Suara Muhammadiyah*, Tahun ke 64, No. 5 Maret I 1984, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1984), hlm. 15.

³Mu'arif, "Surat Kabar : Officieel Orgaan", dalam *Majalah Basis*, No. 1-2, Tahun Ke-60, (Yogyakarta : Yayasan BP Basis, 2011), hlm. 39.

⁴Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, (Jakarta : Gafiti Pers, 1997), hlm. 141.

⁵H. Ahmad Basuni, "46 Tahun Suara Muhammadiyah dan 1 Tahun Wadajah dan Gaja Baru", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 46, No. 15-16, 1966, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1966), hlm. 5-6.

⁶Syaifullah, *Pergeseran Politik Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 3.

⁷Tim Redaksi, "Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah Th. 1969 Di Ponorogo", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 50, No. 3, 1970, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1970), hlm. 8.

⁸Widodo, *Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, (Surabaya : Indah, 1997), hlm. 7-8.

senantiasa berpegang teguh pada fungsi-fungsi yang bernilai edukasi, partisipasi, kontrol, dan formasi. *Kedua*, laporan dan berita dalam majalah *Suara Muhammadiyah* memiliki jarak waktu tulis yang relatif singkat dengan terjadinya suatu peristiwa, oleh karena itu menjadikannya jenis laporan umum (*public reports*) yang dianggap paling kredibel.⁹ Bahkan *Suara Muhammadiyah* menjadi majalah Islam tertua dengan masa hidup yang panjang dan masih eksis hingga sekarang.¹⁰

Ketiga, pers merupakan cerminan kebudayaan. *Keempat*, pers merupakan cerminan intelektual yang digunakan untuk menyalurkan ide dan gagasan. Seperti dalam pandangan Sartono Kartodirdjo, bahwa salah satu fungsi pers dalam organisasi pergerakan adalah untuk menyosialisasikan pergerakannya kepada rakyat karena pers bersifat *continue* dan *intensive*.¹¹ Dalam hal ini, *Suara Muhammadiyah* memuat perkembangan Muhammadiyah sebagai organisasi induk dan menyosialisasikan berbagai amal usaha serta pergerakannya. Berbagai pemikiran politik Islam para pendiri dan tokoh Muhammadiyah juga termuat di dalamnya, termasuk para pakar yang tulisannya termuat dalam kolom artikel dari majalah. Penelitian ini memfokuskan pada dinamika politik Islam Muhammadiyah dan dampaknya terhadap bidang amal usaha lainnya yang termuat dalam majalah *Suara Muhammadiyah* 1965-1985.

METODE PENELITIAN

Metode merupakan prosedur yang sistematis dalam suatu penelitian untuk mendapatkan objek atau bahan yang diteliti. Metode digunakan untuk merekonstruksi dan menganalisa peninggalan masa lampau, dan mengumpulkan sumber sejarah secara efektif, menilainya secara kritis serta mengajukan sintesis dari hasil yang dicapai dalam bentuk tulisan.¹² Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang meliputi empat tahapan pokok. Heuristik merupakan

⁹A. Daliman, *Metode Penelitian Sejarah*, (Yogyakarta : Ombak, 2012), hlm. 62.

¹⁰H. Ahmad Basuni, "65 Tahun Suara Muhammadiyah, SM Pers Tertua dan Lestari, KHA Dahlan Juga Seorang Wartawan", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 65, No. 4, 1985, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1985), hlm. 12.

¹¹Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, (Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992), hlm. 116.

¹²Dudung Abdurahman, *Metode penelitian Sejarah*, (Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 43-44.

proses yang dilakukan oleh peneliti untuk mengumpulkan sumber-sumber sejarah yang digunakan sebagai modal penelitian.¹³ Heuristik bertujuan agar kerangka pemahaman yang didapatkan berdasarkan sumber-sumber yang relevan, yang bisa disusun jelas, lengkap, dan menyeluruh. Penelitian ini menggunakan berbagai sumber, baik primer ataupun sekunder.

Sumber primer merupakan kesaksian seseorang dengan mata kepalanya sendiri baik dengan pancaindera maupun alat mekanis yang selanjutnya disebut sebagai saksi pandangan mata.¹⁴ Data-data dicatat dan dilaporkan oleh pengamat atau partisipan yang benar-benar mengalami dan menyaksikan suatu peristiwa sejarah. Sumber primer yang digunakan untuk penelitian ini terdiri dari berapa arsip, antara lain.

Arsip PP Muhammadiyah, *Majalah Suara Muhammadiyah tahun 1965-1985*.

_____, *Muhammadiyah Dan Undang-Undang Tentang Organisasi Kemasyarakatan Disampaikan Dalam Mukhtar Muhammadiyah Ke-41 Tanggal 7-11 Desember 1985*.

_____, *Bulletin Suara Muhammadiyah Tuntutan Resmi Organisasi Nomer Khusus 15 Januari 1968 Keputusan Mu'tamar Muhammadiyah Ke 37*.

_____, *Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1965-1968 Kepada Mu'tamar Muhammadiyah Ke 57 Pada 21-26 September 1968 di Jogjakarta*.

_____, *Pemberitahuan Tentang Keberadaan Organisasi Muhammadiyah : Data Organisasi Kemasyarakatan No. A/6-266/1987*.

_____, *Tjatatatan & Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah Tahun 1970 Pada 22-25 Djanuari 1971 di Jogjakarta, dan Tuntutan Organisasi No. 1 Agustus 1972*.

Sumber sekunder merupakan sumber yang disampaikan bukan oleh pelaku sejarah yang menyaksikan langsung suatu peristiwa sejarah.¹⁵ Setelah heuristik dilakukan kritik terhadap sumber yang akan digunakan dalam penelitian yang akan menghasilkan fakta sejarah. Kritik sumber yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari dua tahap, yaitu kritik eksternal dan kritik internal.

¹³Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, (Yogyakarta, Tiara Wacana, 2013), hlm. 90.

¹⁴*Ibid.*, hlm. 91.

¹⁵A. Daliman, *op.cit.*, hlm. 55.

Kritik eksternal dilakukan dengan cara verifikasi atau pegujian terhadap aspek-aspek luar dari sumber sejarah.¹⁶ Dalam hal ini, keaslian sumber dari segi fisik dapat dilihat dari jenis kertas, hingga bentuk tulisan yang disesuaikan dengan tahun penulisan. Kritik eskternal akan menghasilkan sumber sejarah yang otentik. Sedangkan kritik intern yang dilakukan untuk melihat dari sudut pandang isi atau substansi dari dokumen dapat dilihat dengan mengkomparasikan data tersebut dengan data lain. Kritik intern akan menghasilkan sumber sejarah yang kredibel

Interpretasi merupakan proses penafsiran data dan fakta sejarah dalam merekonstruksi relitas masa lampau.¹⁷ Menguraikan informasi dari data-data dan sumber yang sudah diperoleh serta sudah dipilih merupakan tahap dimana peneliti harus bisa berfikir logis dan sesuai dengan kaidah-kaidah ilmu sejarah. Interpretasi ada dua macam, yaitu analisis dan sintesis. Setiap sumber sejarah pasti memunculkan beberapa tafsiran berbeda dari tiap peneliti. Langkah analisis ini menuntut kecermatan obyektifitas yang disesuaikan dengan keadaan yang sebenarnya. Untuk menyatukan hasil interpretasi peneliti terhadap data yang diperoleh dilakukan sintesis yakni penggabungan atau pengelompokan sesuai dengan topik yang dibahas. Setelah interpretasi selesai dilakukan tahap akhir yaitu historiografi.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Latar Belakang Berdiri dan Perkembangan Majalah *Suara Muhammadiyah*

Ajaran-ajaran modern Islam Taqiyuddin Ibnu Taimiyah, Muhammad Bin Abdul Wahab, Jamaluddin Al Afghani, Muhammad Abduh, Muhammad Rasyid Ridhla, Abdul A'la Maududi dan lain-lainya akhirnya sampai kepada Kyai Haji Ahmad Dahlan. Selain berdialog langsung dengan Muhammad Rasyid Ridha di Timur Tengah pada 1903-1905, Kyai Haji Ahmad Dahlan juga mendapat pengaruh dari buku bacaan berupa pers Islam dan kitab agama Islam dari luar negeri. Beberapa pers Islam itu diantaranya adalah Al Manar, Al Muayyad, A Siasah, Al Liwa dan Al Adl dari Mesir. Surat kabar Tsamarat Al Funun, Al Qistas, Al Mutaqsim dari Lebanon, dan juga Al Urwutul Wuqsa dari Paris yang diterbitkan oleh hervormer (mujaddid) dunia Islam Jamaluddin Al Afghani.¹⁸ Sementara itu, kitab Islam yang diterimanya antara lain karangan Ibnu Tamimiyah, Ibnu Qayyim, Muhammad

Abduh, Muhammad Rasyid Ridha dan Amir Syakib Arselan.¹⁹ Surat kabar dan kitab Islam tersebut dikirim dan dibawa dengan cara sembunyi menembus blokade dan pengawasan ketat pihak dunae (instansi pemerintah yang bertugas di pelabuhan udara atau laut dan mengawasi semua yang berhubungan dengan bea cukai) dan polisi pemerintah Hindia Belanda. Dialog Kyai Haji Ahmad Dahlan dengan berbagai pers Islam tersebut menghasilkan kesadaran untuk memprakarsai lahirnya pers Islam. Pada 1915, berdirilah majalah *Suara Muhammadiyah* sebagai sarana pendidikan informal dalam rangka menyebarkan ajaran Islam.

Pada awalnya terbitnya *Suara Muhammadiyah* hadir tiap bulan menggunakan bahasa Jawa huruf Latin dengan ukuran 13x20 cm, tebal 22 halaman. Sejauh ini, data arsip tertua yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya adalah arsip *Soewara Moehammadijah* edisi No. 2 tahun 1915 yang ditemukan Kuntowijoyo di perpustakaan Leiden, Belanda.²⁰ Majalah *Suara Muhammadiyah* dicetak di percetakan Sri Pakoealaman di Jalagan. Jajaran redaksinya yang terdiri dari Kyai Haji Ahmad Dahlan, H.M Hisjam, R.H Djaili, M.Siradji, Soemodirdjo, Djojosoegito, dan R.H Hadjid, dibantu dengan pengelola administrasi H.M Ma'roef dan Achsan B.Wadana.²¹ Keberadaan Kyai Haji Ahmad Dahlan sebagai salah seorang anggota redaksi, menjelaskan bahwa Kyai Haji Ahmad Dahlan selain sebagai seorang ulama, guru agama, pemimpin sebuah organisasi yang memiliki pengetahuan yang luas, berpandangan jauh dan memiliki paham modern, juga seorang penerbit pers dan seorang wartawan.²²

Sirkulasi Majalah *Suara Muhammadiyah* pada awal perkembangannya hanya di daerah Jawa, hal ini berkaitan dengan penggunaan bahasa yang digunakan, yaitu bahasa Jawa dan Melayu. Sejak 1921 *Suara Muhammadiyah* mulai menggunakan bahasa Indonesia, dengan penggunaan istilah dalam bahasa Belanda. Perubahan bahasa yang digunakan *Suara Muhammadiyah* ini digunakan agar komunikasi dan penyebaran ajaran Islam dapat diterima dengan mudah oleh semua kalangan. Faktor lain yang mempengaruhi perubahan bahasa adalah area pergerakan dari

¹⁹*Ibid.*

²⁰Mu'arif, *Benteng Muhammadiyah: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Haji Fachroedin 1890-1929*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2010), hlm. 184, 187.

²¹Taufik Rahman, *Tanah Air Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia*, (Jakarta : I BOEKOE, 2007), hlm. 56.

²²H. Ahmad Basuni, "65 Tahun Suara Muhammadiyah, SM Pers Tertua dan Lestari, KHA Dahlan Juga Seorang Wartawan", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 65, No. 4, 1985, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1985), hlm. 12.

¹⁶Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, (Yogyakarta: Ombak, 2012), hlm. 104.

¹⁷Daliman, *op.cit.*, hlm. 83.

¹⁸H. Ahmad Basuni, "Pers Usaha Muhammadiyah, KHA Dahlan Prakarsai Terbitkan Suara Muhammadiyah", Tahun Ke 64, No. 5, Maret 1984, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1984), hlm. 15.

Muhammadiyah yang semula hanya di Yogyakarta meluas menjadi Hindia Belanda. Persetujuan pemerintah Hindia Belanda tertuang dalam *Besluit Goebnemen* 2 September 1921 No. 36.²³ Maklumat tersebut membenarkan perubahan dalam artikel (ayat) 4, 5, dan 7 *Statuten* (Anggaran Dasar) Perserikatan Muhammadiyah. Dalam artikel 4 dan 7 *Statuten* perkataan “di Residentie Djogjakarta” harus dibaca “di Hindia Belanda”. Perkembangan *Suara Muhammadiyah* semakin pesat setelah K.H Fachruddin, murid Kyai Haji Ahmad Dahlan yang juga seorang wartawan dan pemimpin redaksi berbagai Majalah saat itu kembali memimpin *Suara Muhammadiyah*. Terhitung pada *Suara Muhammadiyah* No. 1, tahun ke-3, 1922.²⁴

Majalah *Suara Muhammadiyah* pada awal penerbitannya belum resmi atas nama perserikatan Muhammadiyah, walaupun isi yang dimuat selain untuk menyiarkan Islam juga menyiarkan Muhammadiyah. Baru pada 1933 *Suara Muhammadiyah* menjadi *official orgaan* (majalah resmi) dari organisasi Muhammadiyah, dengan dipimpin oleh M. Junus Anies yang merangkap sebagai sekretaris Muhammadiyah dibantu oleh M. Ridho Anis.²⁵ Tujuan majalah *Suara Muhammadiyah* tidak bisa lepas dari tujuan Muhammadiyah sebagai organisasi induknya, yaitu menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam yang sebenarnya. Tujuan Muhammadiyah tersebut akan dicapai dengan berbagai usaha, seperti dakwah Islamiyah, pendidikan, mengobarkan semangat gotong royong/tolong menolong dan lainnya. Hal ini menunjukkan akan pentingnya media cetak sebagai sarana dakwah (*dakwah bil qalam*) untuk mencapai tujuan Muhammadiyah

Selain itu, sebagai suatu organisasi, Muhammadiyah mempunyai bagian-bagian organisasi yang bersifat vertikal (pusat, wilayah, daerah cabang) dan yang bersifat horizontal (majelis-majelis atau bagian-bagian). Dalam berprosesnya, muncul suatu komunikasi berupa penyampaian berita yang terdiri dari perintah/intruksi, pengumuman, laporan, dan yang lainnya.²⁶ Muhammadiyah sebagai suatu organisasi juga tidak dapat hidup sendirian. Muhammadiyah hidup bersama organisasi lainnya, dengan instansi pemerintah, partai-partai politik, organisasi massa dan yang lainnya. Dalam komunikasi terhadap pihak luar berisi berita tentang sikap dan kegiatan Muhammadiyah, sehingga

pihak luar mendapat penjelasan yang cukup dan mengerti apa dan bagaimana Muhammadiyah itu. Terdapat banyak alat atau media untuk menyelenggarakan proses komunikasi Muhammadiyah, dan *Suara Muhammadiyah* merupakan salah satu alat komunikasi tertulis yang bertugas menyampaikan kedua komunikasi tersebut dengan maksud melancarkan berprosesnya Muhammadiyah dalam mencapai tujuannya.

Terwujud atau tidaknya tugas majalah *Suara Muhammadiyah* sangat bergantung kepada persoalan apakah pihak-pihak yang bersangkutan dengan *Suara Muhammadiyah* sudah menjalankan tugasnya dengan baik. Selain pihak dari majalah *Suara Muhammadiyah* seperti penulis dan pengurus majalah *Suara Muhammadiyah*, pihak utama dalam hal ini adalah organisasi Muhammadiyah. Muhammadiyah harus memahami peranan majalah *Suara Muhammadiyah* untuk menggunakan *Suara Muhammadiyah* seefektif mungkin untuk keperluan komunikasi intern dan ekstern. Terutama mengenai hal-hal yang secara luas perlu diketahui anggota Muhammadiyah pada umumnya. Karena bidang usaha yang dilakukan Muhammadiyah itu luas, maka perlu diadakan pemilihan bidang-bidang yang perlu mendapat alokasi lebih dari pada bidang lainnya. Anggota Muhammadiyah juga harus memahami tujuan *Suara Muhammadiyah* untuk berusaha menjadi liganan secara perorangan maupun kelompok dan rajin membacanya agar memahami dan mengerti isi yang termuat dalam *Suara Muhammadiyah*.

Dari penjelasan diatas, sebagai media pers nasional dan majalah resmi organisasi Muhammadiyah, *Suara Muhammadiyah* merupakan sarana dakwah Islamiyah, sarana informasi komunikasi, sarana pendidikan, dan sebagai reproduksi ideologis dari Muhammadiyah. Hal ini sesuai dengan visi dan misi majalah *Suara Muhammadiyah*.

1. Visi Majalah *Suara Muhammadiyah*

- a. Visi ideologi, *Suara Muhammadiyah* merupakan pers yang senantiasa menempatkan hidup dan gerakannya berlandaskan Al-Qur'an dan As-Sunnah serta paham agama menurut Muhammadiyah sebagai induknya.
- b. Visi profesi, *Suara Muhammadiyah* merupakan pers Islam berwawasan tadjid dan berfungsi sebagai dakwah amar ma'ruf nahi munkar dan pers nasional yang dalam melaksanakan tugasnya berpegang pada nilai-nilai ptofessionalisme sebagaimana tuntunan jurnalistik modern tanpa harus mengabaikan kaidah-kaidah agama dan jurnalistik.

2. Misi Majalah *Suara Muhammadiyah*

- a. Segi konstitusi, *Suara Muhammadiyah* merupakan pers yang senantiasa memiliki komitmen pada nilai-nilai luhur bahasa dan berbagai perangkat peraturan konstitusional, selama hal tersebut tidak bertentangan dengan ideologinya.

²³*Ibid.*

²⁴Mu'arif, *op.cit.*, hlm. 186.

²⁵Tim Redaksi, “Malam Setengah Abad *Suara Muhammadiyah*”, *Suara Muhammadiyah*, Tahun ke-50, No.3, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1970), hlm. 3.

²⁶S.S.Widagdo, “Peranan *Suara Muhammadiyah* dalam Muhammadiyah”, *Suara Muhammadiyah*, Tahun Ke 38, No. 1 & 2 Januari 1966, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1966), hlm. 23.

b. Segi operasional, *Suara Muhammadiyah* merupakan pers yang gerakannya senantiasa berpegang teguh pada fungsi-fungsi yang bernilai edukasi, partisipasi, kontrol, dan formasi.

Pada 1965, majalah *Suara Muhammadiyah* melaksanakan reorganisasi yang dikenal dengan istilah “Wajah dan Gaya Baru”. Reorganisasi ini meliputi banyak hal, baik mengenai pimpinan, kualitas penerbitan, kualitas isinya, dan lahirnya cita-cita baru. Pertama, memberikan berbagai pendapat dari para pakar dalam berbagai bidang permasalahan kepada pembaca dan masyarakat. Kedua, menyuarakan penggalangan persatuan dan kesatuan umat Islam Indonesia pada khususnya, rakyat Indonesia pada umumnya. Ketiga, memberikan *social support* dan *social control* kepada segala kegiatan, baik yang dilakukan oleh pemerintah (militer dan sipil) maupun masyarakat pada umumnya. Sikap tersebut terlihat dalam usaha Muhammadiyah saat menghadapi situasi baru terkait G30S/PKI yang didalangi dan dilakukan oleh PKI (Partai Komunis Indonesia) dengan segala epilognya. Cita-cita itu membuat *Suara Muhammadiyah* semakin berkualitas dan dapat meluas sesuai dengan meluasnya daerah Muhammadiyah yang telah meliputi seluruh Indonesia.²⁷ *Suara Muhammadiyah* terus bergerak seiring dengan cita-citanya, dan terus beradaptasi dengan pasang surut situasi politik dan ekonomi di Indonesia.

B. Perjuangan Politik Muhammadiyah dalam Majalah *Suara Muhammadiyah*

Keterlibatan Muhammadiyah dalam bidang politik didasarkan pada dua prinsip. Pertama, Muhammadiyah memerlukan aspirasi politik yang dilakukan di luar organisasi Muhammadiyah. Kedua, penyaluran aspirasi politik melalui partai politik Islam (atau Islami) harus dilakukan dengan tujuan kemenangan Islam dan umatnya secara keseluruhan. Maka politik Muhammadiyah berdinamisasi sejalan dengan rumusan kepentingan dakwah sebagai proses pengembangan masyarakat yang bersifat dinamis dan antisipatif. Secara substansial politik Muhammadiyah tetap diarahkan kepada upaya pengembangan tata kehidupan sosial/masyarakat diatas prinsip ajaran Islam. Substansi inilah yang mendasari model perjuangan politik yang dibawa Muhammadiyah. Melalui majalah *Suara Muhammadiyah* yang merupakan media dakwah sekaligus saluran komunikasi berkala resmi milik Muhammadiyah perjuangan politik Muhammadiyah termuat dengan jelas didalamnya.

1. Pengaruh G30S/PKI terhadap Transformasi Politik Muhammadiyah

Pada 1965, fase akhir dari pemerintahan Presiden Soekarno dan awal pemerintahan Presiden Soeharto terjadi pergolakan politik nasional yang dalam *Suara Muhammadiyah* disebut sebagai bencana nasional. Pergolakan ini diakibatkan adanya tindakan dan aksi sebuah gerakan dengan nama “Gerakan 30 September” (G30S/Gestapu). Gerakan kontra revolusi yang didalangi oleh Partai Komunis Indonesia (PKI), dipimpin dan digerakkan seorang perwira menengah Angkatan Darat (AD), komandan batalion Tjakrahiwara (pasukan pengawal pribadi Presiden) Lektol Untung.²⁸ Gerakan tersebut bertindak pada 30 September 1965 malam (dimungkinkan sebagai alasan dibalik penamaan gerakan) dengan melakukan penculikan dan pembunuhan terhadap 6 perwira tinggi pimpinan AD dan seorang perwira I.²⁹

Pemberian kewenangan Presiden Soekarno kepada Jenderal Soeharto dalam Surat Perintah 11 Maret untuk memimpin pemerintahan membuka fase baru dalam periode epilog G30S/PKI.³⁰ Dengan gagalnya G30S/PKI, bukan hanya memberi alasan Soeharto dengan dukungan ABRI berusaha merombak bentuk dan susunan negara yang dilandasi dan dijiwai UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen³¹, tetapi memberi peluang politik Islam modern untuk muncul kembali dalam medan politik.³² Pada masa transisi ini, Muhammadiyah menganggap bahwa momen diletakannya dasar-dasar bagi bentuk dan susunan negara dan pemerintahan yang baru merupakan momen yang sangat penting. Sebab, bentuk dan susunan negara dan pemerintahan yang baru itu lebih lanjut akan sangat ditentukan oleh dasar-dasar yang akan diletakan. Pada saat itu, aspirasi politik Muhammadiyah dan organisasi yang sepeham dari kalangan umat Islam belum tergabung dalam suatu wadah yang berupa alat perjuangan. Agar bisa

²⁸Tim Redaksi, “Bencana Nasional”, *Suara Muhammadiyah*, Tahun 37, No. 5-6, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1965), hlm. 3.

²⁹Asfan Amin Putera, “Penyelesaian G30S Dibidang Militer dan Politik”, *Suara Muhammadiyah*, Tahun 37, No. 7-8, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1965), hlm. 5.

³⁰Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 155.

³¹Menteri/Pangad Mayor Jenderal Soeharto, *Tugas Kita Bersama Menghanturkan Keratjunan dari Kontrev G30S/PKI*, *Suara Muhammadiyah*, Tahun 38, No. 1-2, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1965), hlm. 43.

³²MT. Arifin, *Muhammadiyah Potret Yang Berubah*, (Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2016), hlm. 364.

²⁷*Ibid.*

menyalurkan aspirasi politiknya, Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah segera mengadakan Konferensi Kilat Muhammadiyah dan Pemuda Muhammadiyah pada 9-11 November 1965 di Jakarta. Konferensi Kilat tersebut telah memutuskan beberapa hal, antara lain :

- a. memperjuangkan kedudukan dan posisi Muhammadiyah dalam lapangan politik kenegaraan sejajar dengan orpol².
- b. memberikan sumbangan fikiran yang berupa konsep² dalam segala aspek kehidupan.
- c. memberikan sumbangan fikiran dan tenaga setjara aktif guna kebaikan dan kelanjutan djalannya roda pemerintahan.
- d. menjiapkan dan berusaha dalam batas² kemungkinan mengisi kekosongan djabatan dalam lembaga kenegaraan, pemerintahan dan lembaga² lainnja.
- e. menyiapkan potensi yang riil guna melakukan massa aksi yang militan dan bersifat konstruktif.³³

Pada akhir pemerintahan Orde Lama tepatnya 5 Januari 1966, Muhammadiyah akhirnya mendapatkan pengakuan sebagai organisasi kemasyarakatan yang memiliki fungsi politik riil. Hal ini sesuai dengan surat keputusan dari Wampa Subandrio.³⁴ Dikukuhkan dengan tiga surat pada awal pemerintahan Orde Baru, yaitu surat Wakil Perdana Menteri Bidang Sospol, Adam Malik tertanggal 17 April 1966 No.19/WPM/SP/1996; surat Menteri Dalam Negeri, Basuki Rachmat tertanggal 24 Juni 1966 No. 22/2/32; dan surat Menteri Dalam Negeri tertanggal 8 Agustus 1966 No. 22/2/47.³⁵ Realisasi dari surat-surat itu, yakni dengan duduknya wakil-wakil Muhammadiyah di bidang legislatif maupun eksekutif.

2. Peran Muhammadiyah dalam Rehabilitasi Partai Masyumi

Pada 23 Mei 1966 diadakan Rapat Pleno Pimpinan Pusat Muhammadiyah yang memutuskan untuk mengadakan Sidang Tanwir pada 15-19 Juni

1966.³⁶ Sidang Tanwir itu memutuskan untuk memprakarsai usaha bersama terwujudnya satu partai Islam yang menampung umat Islam yang belum tergabung dalam satu partai Islam, dengan agenda utama merehabilitasi Partai Majelis Sy'uro Muslimin Indonesia (Masyumi).

Kalangan bekas pemimpin Partai Masyumi menyatakan bahwa perubahan rezim dari Orde Lama ke Orde Baru dianggap saat yang memungkinkan untuk mengemukakan alasan pembubaran Partai Masyumi yang tidak wajar, terutama kepada yang berwajib dan berwenang. Dengan harapan terdapat pengertian dan penilaian yang baik tentang masalah Partai Masyumi, agar Partai Masyumi direhabilitasi.

Bahwa Masjumi memandang pembubaran terhadap Masjumi itu tidak wajar, dinjatakan pula dengan keterangan bahwa sesudah Masjumi membubarkan dirinja pada bulan September 1960 (hingga Masjumi tidak sampai dianggap partai terlarang) Prawoto Mangkusasmito bekas ketua umum PB Masjumi telah memberikan kuasa kepada Mohammad Rum SH untuk mejampaiakan pengaduan terhadap pemerintah mengenai pembubaran Masjumi itu kepada Pengadilan Djakarta Raya, yang dijawab oleh ketua Pengadilan Negeri tersebut bahwa Pengadilan Negeri itu tidak berwenang untuk memeriksa perkara tuntutan itu. Pengaduan itu kemudian disampaikan kepada Pengadilan Tinggi di Djakarta Raya, tetapi sampai hari ini belum ada balasan...Fakta dan keterangan yang diberikan dan masih akan diberikan dimaksudkan untuk „menghapus arang yang tertjoreng dikeneng Masjumi”, dengan kata lain supaya Masjumi direhabilitasi.³⁷

Muhammadiyah memainkan perannya untuk mengusahakan rehabilitasi Partai Masyumi. Pertama, pada 9 Mei 1966, elit Muhammadiyah berupaya melobi pemerintah. K.H. Fakhri Usman menyampaikan nota kepada Pangdam Jaya menuntut direhabilitasinya Masyumi dan meneruskan gugatan Prawoto Mangkusasmito terhadap rezim Soeharto tertanggal 6 September 1960 tentang pembubaran Partai Masyumi yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta. Kedua, pada 16 Desember 1966 Muhammadiyah mendirikan Badan Koordinasi Amal Muslim (BKAM) yang menjadi wadah bagi organisasi afiliasi dan atau

³³Tim Redaksi, "Laporan PP Muhammadiyah : Dari Mu'tamar ke Tanwir, Masalah Organisasi dan Politiknya (II)", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 38, No. 13-14, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1966), hlm. 26.

³⁴PP Muhammadiyah, *Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1965-1968 Kepada Mu'ktamar Muhammadiyah Ke 37 Pada 21-26 September 1968 di Jogjakarta*, hlm. 4.

³⁵Syaifulloh, *Pergeseran Politik Muhammadiyah*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015), hlm. 5.

³⁶Tim Penyusun Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah, Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, (Jakarta : Buku Kompas, 2010), hlm. 200.

³⁷Tim Redaksi, "Situasi Tanah Air : Pilih Presiden Baru Tjalon2 : Hatta, Sultan, Nasution", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 38, No. 10, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1966), hlm. 20.

organisasi sosial yang mendukung Masyumi memperjuangkan hak-hak politiknya.

Pada 21 Desember 1966, ABRI mengeluarkan pernyataan bahwa tindakan akan diberikan kepada pihak dan golongan mana pun yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945 seperti yang dilakukan oleh Pemberontakan PKI di Madiun, G30S/PKI, Darul Islam, Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia (PSI). Pernyataan itu, ditanggapi Prawoto Mangkusumito dengan mengirim surat kepada Ketua Presidium Kabinet Jenderal Soeharto untuk menanggapi pernyataan ABRI. Dalam suratnya, Prawoto mengatakan keberatannya terhadap pernyataan yang bernada menyejajarkan Masyumi dengan PKI, dan menolak penggolongan Masyumi sebagai salah satu partai yang menyimpang dari Pancasila dan UUD 1945. Selain itu, pernyataan ABRI tersebut bertentangan dengan hasil seminar Angkatan Darat di Bandung pada Agustus 1966 yang merekomendasikan agar anggota-anggota partai yang dibubarkan pada Orde Lama kecuali PKI, diperkenankan ikut serta dalam kehidupan politik.

Pada 6 Januari 1967, Soeharto menyatakan bahwa alasan-alasan yuridis, ketatanegaraan, dan psikologis telah membuat ABRI pada satu pendirian bahwa ABRI tidak dapat menerima rehabilitasi Partai Masyumi. Soeharto berkata : "Sulit untuk merehabilitasi partai yang pernah mengkhianati Pancasila". Berkaitan dengan pernyataan ABRI yang dipermasalahkan Prawoto, Soeharto menyatakan bahwa pernyataan ABRI bukanlah hal khusus, tetapi merupakan penegasan pendirian ABRI untuk menumpas segala bentuk penyimpangan terhadap Pancasila dan UUD 1945. Jelaslah bahwa penolakan pemerintah merehabilitasi Partai Masyumi karena anggapan keterlibatannya dalam pemberontakan PRRI dan Permesta pada 1958 dan kekhawatiran berulangnya konflik ideologis yang dapat mengancam pembangunan nasional. Meskipun bukan alasan utama, karena menurut Verkuyl, penolakan pemerintah terkait rehabilitasi juga dikarenakan kecenderungan Partai Masyumi yang ingin mendirikan negara Islam.

Kegagalan merehabilitasi Partai Masyumi disambut dengan izin bersyarat kepada BKAM untuk mendirikan partai baru yang tidak memiliki keterkaitan dengan dengan Partai Masyumi dan para elit politiknya. Hatta dan beberapa alumni Himpunan Mahasiswa Islam mencoba mendirikan Partai Demokrasi Islam Indonesia. Usaha itu pun mengalami kegagalan karena tidak mendapat izin dari pemerintah. Muhammadiyah mencoba melakukan langkah terobosan untuk mendirikan Partai Islam Indonesia (PII) yang diprakarsai oleh elit-elit Muhammadiyah seperti Farid Ma'ruf, Lukman Harun, S. Projokusumo, dan beberapa elit lainnya. Namun, proses pendirian PII juga mengalami kegagalan seperti halnya usaha rehabilitasi Partai Masyumi.

Sebagai jalan keluar terhadap upaya umat Islam, Presiden Soeharto menyarankan untuk mengubah status Muhammadiyah menjadi partai

politik. Namun, Muhammadiyah menolak karena bertentangan dengan prinsip perjuangan Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam. Dalam kondisi yang cukup sulit tersebut Muhammadiyah memutuskan pilihan ketiga. Keputusan ini diambil setelah pilihan pertama tidak berhasil diusahakan dan pilihan kedua mustahil dilaksanakan. Hal tersebut menjadi salah satu alasan Muhammadiyah memprakarsai dibentuknya partai Islam baru yang tetap memiliki kesamaan ideologi dengan Partai Masyumi. Setelah tercapainya kompromi tersebut sebagai alternatif pemerintah menyetujui dibentuknya partai Islam Baru, maka, Panitia Tujuh yang diketuai K.H Fakhri Utsman (Muhammadiyah) menyepakati dibentuknya Partai Muslimin Indonesia (Parmusi) pada April 1967.³⁸

3. Hubungan Muhammadiyah dengan Partai Muslimin Indonesia

Surat Keputusan Presiden No. 70/1968 tertanggal 20 Februari 1968 secara resmi mensahkan berdirinya Parmusi dibawah pimpinan Djanarwi Hadikusumo dan Lukman Harun (keduanya dari Muhammadiyah) sampai dengan terselenggaranya Muktamar. PP Muhammadiyah setelah membicarakan tentang telah diakui berdiri dan lahirnya Partai Muslimin Indonesia dalam Rapat Pleno PP Muhammadiyah yang diadakan dikantor Perwakilan PP Muhammadiyah Menteng, Jakarta pada 27-28 Februari 1968, mengeluarkan beberapa pernyataan diantaranya sebagai berikut,

...Partai Muslimin Indonesia hendaknya dpt memperlihatkan wujud perjuangan politik umat Islam yang dilandasi jiwa dan ruh Islam yang murni, mengisi dan memperkuat dasar Negara Pantjasila, membina Orde Baru yang bersendikan kebenaran dan keadilan dan mendjamin hak2 asasi dan hak2 demokrasi manusia menjapai negara dan masyarakat yang adil dan makmur yang diridhai oleh Allah S.W.T. Kepada warga Muhammadiyah diseluruh Indonesia, diandjurkan supaya bersama-sama dengan umat Islam Indonesia umumnja giat membentuk dan membina Partai Muslimin di Indonesia. Dengan berdirinya Partai Muslimin Indonesia, maka organisasi Muhammadiyah sebagai Gerakan Da'wah Islam akan lebih meningkatkan dan memantapkan tugas dari amalanja dibidang da'wah Islamijah, terutama dalam mewujudkan adjaran2 Islam yang murni

³⁸Tim Redaksi, "Sikap Muhammadiyah Terhadap Pembentukan Partai Muslimin Indonesia", *Suara Muhammadiyah*, Tahun XLVII, No. 16, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1967), hlm. 3.

dibidang ibadah, pendidikan, sosial dan kesedjahteraan rakyat...³⁹

Bagi Muhammadiyah, berdirinya Parmusi juga dimaksudkan agar Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam lebih memantapkan tugas dakwahnya. Sebab, masalah politik sudah diwadahi oleh Parmusi. Karena itu, disamping menyukkseskan pendirian Parmusi, Muhammadiyah juga memberikan fasilitas dan prioritas yang banyak dengan mengizinkan anggotanya untuk bergabung dalam Parmusi. Sayangnya, terdapat kontradiksi yang menyebabkan terlantarnya organisasi Muhammadiyah. Keadaan ini, melahirkan instruksi baru sejalan dengan keputusan Sidang Tanwir 1966 dan keputusan dalam Anggaran Rumah Tangga pasal 2 ayat 6. Dalam intruksi tersebut disebutkan bahwa perangkapan keanggotaan dengan anggota suatu partai politik atau pergerakan lainnya, hanya dapat dibenarkan setelah mendapatkan izin dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah. Khusus untuk Ketua Muhammadiyah mutlak tidak diizinkan menjadi pengurus partai politik atau pergerakan lainnya. Dengan tujuan agar keaktifan anggota Muhammadiyah tidak membuat perkembangan dakwah Muhammadiyah terganggu.

Setelah kebijaksanaan demi kebijaksanaan mulai dilaksanakan, pada perkembangannya muncul friksi internal dalam tubuh Parmusi. Munculnya friksi tersebut disebabkan oleh ketidakpuasan atas kepemimpinan Djanarwi Hadikoesomo dan Lukman Harun. Pada Oktober 1970 Djaelani Naro dan Ali Imron Kadir (Naroka) mengeluarkan pernyataan menuduh Dewan Pelaksanaan Partai telah melakukan penyimpangan yang membawa partai pada posisi oposisi dengan pemerintah dan ABRI. Pimpinan partai juga telah menimbulkan pertentangan dan kegoncangan terus menerus dalam pimpinan partai.⁴⁰ Dengan dalih menyelamatkan partai, Naro mengumumkan dirinya sebagai Formatur Dewan Partai yang baru, Naro menjadi ketua umum dan Imron Kadir menjadi sekertaris umum. Peristiwa pengambil alihan tersebut merupakan pengambil alihan kepemimpinan partai secara paksa di kalangan Islam untuk pertama kalinya yang terjadi dalam sejarah politik Indonesia modern.

Berbagai tuduhan Naroka terhadap Parmusi yang dianggap bersikap konfrontasi terhadap pemerintahan Soeharto adalah tuduhan tidak berdasar. Parmusi selalu melakukan koreksi dan kritik membangun terhadap hal-hal yang menyimpang dari

konstitusi dan peraturan perundangan yang ada. Koreksi dan kritik itu sesuai dengan garis perjuangan amar ma'ruf nahi munkar agar Orde Baru yang telah ditegakan itu benar-benar membawa keadilan, kemakmuran, dan kebahagiaan yang dicita-citakan oleh rakyat. Hal ini tidak lain sebagai suatu usaha untuk mengamalkan dan mengamankan Pancasila dan UUD 1945 secara konsekuen. Justru pengambil alihan kepemimpinan partai yang dilakukan Naroka inilah yang mengandung konfrontasi terhadap pemerintahan Soekarno.

Sebenarnya pembadjakan Naroka itu sekaligus adalah pengindjak-indjak Surat Keputusan Presiden No. 70 setjara sewenang-wenang. SK No. 70 ini berisi ketetapan presiden tentang pengesjahan berdirinja Partai Muslimin beserta susunan pengurusnya. Seperti kita ketahui pengurus partai berdasarkan ketetapan presiden itu Ketua Umumnya adalah H. Djanarwi Hadikusumo dan Drs. Lukman Harun sebagai sekjen. Susunan pengurus inilah yang dibadjak oleh Naroka cs. Bukankah ini berarti Naroka cs. telah mengindjak-indjak keputusan presiden yang sjah? Tahulah kita bahwa djustru Narokalah yang melakukan konfrontasi terhadap pemerintah dan merobek2 keputusan presiden.⁴¹

Tindakan Naroka terhadap kepengurusan Parmusi menimbulkan kemelut dalam tubuh partai yang menyebabkan tampilnya Menteri Negara HMS Mintaredja sebagai ketua umum partai baru sesuai SK Presiden No. 70/1970 tertanggal 10 November 1970. Penunjukan Mintareja sebagai ketua umum Parmusi menimbulkan kekecewaan di kalangan Muhammadiyah dan pihak Djanarwi-Lukman. PP Muhammadiyah menyatakan bahwa pembentukan pimpinan Naroka adalah sebuah inkonstitusini. Untuk mengatasi kemelut yang terjadi, pertemuan Djanarwi-Mintaredja dan menghasilkan beberapa kesepakatan:

1. Pembentukan Dewan Pertimbangan Partai sesuai dengan hasil kongres Parmusi di Malang tahun 1968;
2. Mintaredja berjanji tidak akan membentuk pengurus tandingan di daerah-daerah karena massa Parmusi pada umumnya berpihak kepada Djanarwi-Lukman;
3. Calon-calon yang akan diajukan dalam pemilihan umum 1971 adalah mereka yang telah dibentuk oleh pengurus Parmusi SK Presiden No. 70 tetap dipertahankan;

³⁹Tim Redaksi, "Pernyataan PP Muhammadiyah Terhadap Diakui Berdirinja Partai Muslimin Indonesia", *Suara Muhammadiyah*, Tahun XLVIII, No. 5, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1968), hlm. 3.

⁴⁰Muhammad Kamal Hassan, *Modernisasi Indonesia : Respons Cendekiawan Muslim*, (Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia Ciputat, 1987), hlm. 106-107.

⁴¹Tan Lelana, "Perombakan PP Partai Muslimin, *Suara Muhammadiyah*, Tahun 50, No. 17-18, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1970), hlm. 5.

4. Sesuai dengan keputusan Presiden Soeharto, setelah pemilihan umum akan dilangsungkan Muktamar Parmusi untuk menjernihkan situasi dalam tubuh partai.

Kesepakatan Djanarwi-Mintaredja hanya berlangsung beberapa hari. Pada 20 Desember 1970, PP Parmusi telah mengalami perombakan berdasarkan SK No. 77/1970, diantaranya tercantum nama Ketua Umum HMS Mintaredja, Ketua I Agus Sudono, Ketua II Ir. HM Sanusi, dan Sekjen Dr Sulastomo. Dengan jumlah seluruh anggota 34 orang, dan yang telah diketahui 22 orang.⁴² PP Parmusi yang sejatinya diproyeksi sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang politik, semakin sulit untuk diwujudkan. Bahkan beberapa elit Parmusi yang baru justru tidak menunjukkan akhlak sesuai dengan ajaran Islam.

Parmusi yang sejatinya diproyeksi sebagai salah satu amal usaha Muhammadiyah di bidang politik, semakin sulit untuk diwujudkan. Pada 25-28 Desember 1969, Muhammadiyah menyelenggarakan Sidang Tanwir di Ponorogo. Sidang Tanwir ini berhasil melahirkan keputusan yang secara formal berisi sikap dan pandangan politik Muhammadiyah (*Khittah* Ponorogo). Ketegasan sikap politik Muhammadiyah yang tercermin dari hasil Sidang Tanwir tersebut dituangkan dalam bentuk pernyataan bersama antara Muhammadiyah dan Parmusi. Pernyataan yang ditandatangani AR. Fachruddin dan Mintaredja menyebutkan bahwa antara Muhammadiyah dan Parmusi tidak ada hubungan organisatoris dan afiliasi politik. Sikap ini terpaksa diambil karena Parmusi dipandang tidak lagi dapat menampung aspirasi politiknya.⁴³ Walau demikian Muhammadiyah tetap membenarkan warganya aktif dalam Parmusi. Meskipun secara formal organisatoris tidak ada hubungan maupun afiliasi politik akan tetapi secara ideologis tetap memiliki kaitan tak terpisahkan. Secara konkrit dibuktikan dengan instruksi kepada seluruh warga Muhammadiyah untuk merasa ikut bertanggung jawab terhadap kemenangan Parmusi pada pemilu 1971.

Melalui Muktamar Muhammadiyah ke-38 yang berlangsung pada 21-26 September 1971 di Ujung Pandang (Makassar), Muhammadiyah memperjelas kedudukan Muhammadiyah dalam hubungannya dengan partai-partai politik dan golongan-golongan lainnya, khususnya dengan Parmusi dalam rangka meningkatkan Muhammadiyah sebagai Gerakan Dakwah Islam. Pertama, Muhammadiyah menentukan posisi dan sikapnya yang tidak berpihak kepada kepentingan politik praktis dan tidak memiliki hubungan organisatoris dengan partai politik. Kedua, apabila *Khittah* Ponorogo masih menyisakan ruang

dukungan kepada Parmusi, maka *Khittah* Ujung Pandang secara jelas menunjukkan independensinya dengan memosisikan hubungan yang sama dengan semua partai politik, termasuk Parmusi. Ketiga, sebagai bagian dari keterbukaan dan kemandirian politik, Muhammadiyah memberikan kebebasan politik kepada warganya, baik dengan menggunakan hak politiknya maupun tidak.⁴⁴ Dengan substansi yang hampir sama, *Khittah* Ujung Pandang disempurnakan oleh *Khittah* Surabaya yang dicetuskan sebagai hasil Muktamar Muhammadiyah ke-40 pada 24-30 Juni 1978.⁴⁵ Dalam *khittah* Surabaya tidak terdapat lagi tentang keberpihakan Muhammadiyah terhadap partai politik.

C. Dampak Keterlibatan Muhammadiyah dalam Politik

Persentuhan Muhammadiyah dengan dunia politik praktis di satu pihak memberi keuntungan tersendiri bagi perkembangan organisasi. Terutama dalam membangun relasi sosial politik ke pusat-pusat pengambilan keputusan (kekuasaan). Namun, disisi lain fungsi politik yang dijalankan Muhammadiyah seringkali melelahkan dan kontra-produktif dan tidak jarang membawa hal negatif, baik pada jangka pendek maupun jangka panjang. *Pertama*, mundurnya garapan dakwah Muhammadiyah yang bersifat sosial kemasyarakatan dan keagamaan, khususnya dakwah Islamiyah. Pandangan dan sikap politik Muhammadiyah yang menentang G30S/PKI berdampak pada usaha Muhammadiyah untuk merumuskan landasan dakwah Islamiyah Muhammadiyah. Hal ini terjadi ketika perubahan politik yang terjadi sekitar G30S/PKI semakin memunculkan ideologi komunisme dan sekulerisme yang bertentangan dengan Pancasila.⁴⁶ Selain itu, pasca G30S/PKI terjadi gelombang perpindahan agama pada umat Islam. Menurut Robert Cribb sebagian besar trauma kejadian sekitar G30S/PKI yang membebani masyarakat Indonesia, tersalurkan dalam bentuk gelombang perpindahan agama. Diperkirakan 2,8 juta orang berpindah agama menjadi Kristen (baik Protestan maupun Katolik), khususnya di Jawa Timur, Timor Timur, dan Sumatra Utara. Pada saat yang sama, di

⁴⁴Tim Penyusun Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *op.cit.*, hlm. 228-229.

⁴⁵Tim Redaksi, "Tajuk Rencana : Berjumpa di Mu'tamar Surabaya", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 58, No. 12, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1978), hlm. 5.

⁴²Tan Lelana, *op.cit.*, hlm. 15.

⁴³Tim Redaksi, "Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah Th. 1969 Di Ponorogo, *Suara Muhammadiyah*, Tahun 50, No. 1-2, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1970), hlm. 2.

⁴⁶Tirtodiningrat, "Larangan Komunisme di Indonesia", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 47, No. 11-12, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1967), hlm. 18-19.

Jawa orang yang berpindah agama menjadi pemeluk Hindu jumlahnya juga signifikan.⁴⁷

Skala perpindahan agama ini telah menunjukkan bahwa trauma politik 1965, telah mengguncangkan banyak orang dan membuat mereka kehilangan kepercayaan terhadap nilai-nilai yang dianut sebelumnya. Sebagai solusinya mereka menerima agama baru. Atas guncangan tersebut agama Kristenlah yang paling diterima dengan baik, karena tidak seperti agama Islam, agama Kristen terkesan jauh dari keterlibatan konflik politik sebelum tahun 1965. Lebih jauh lagi yang membedakannya dengan Islam adalah gereja Kristen memiliki pastoral yang bekerja membimbing orang-orang dari kelompok kiri pada umumnya tanpa memperdulikan pandangan masyarakat terhadap kelompok kiri, sehingga agama Kristen mendapat tanggapan yang baik diantara orang-orang yang sebelumnya hampir tidak memiliki perhatian terhadap agama.⁴⁸ Dalam kasus agama Hindu, ketertarikan untuk kembali pada kepercayaan Jawa sebelum Islam sebagai upaya mencari stabilitas mungkin merupakan sesuatu yang dianggap penting. Agama Hindu juga menarik bagi mereka yang secara politis mempunyai kepentingan untuk menahan ekspansi pengaruh politik Islam.

Alasan perpindahan agama tersebut cukup kompleks dan tidak dapat dilepaskan dari peran pemerintah dan kelompok umat Islam. Sejak tahun 1966, pemerintah Orde Baru berasumsi bahwa agar pengaruh komunisme berhasil dipangkas habis, para bekas anggota komunis (yang diyakini menganut ateisme) didorong untuk memeluk satu diantara agama resmi yang diakui pemerintah. Selain itu, oleh karena Islam merupakan kelompok yang paling depan melakukan gerakan komunisme, suatu hal yang rasional apabila para bekas anggota komunis mencari perlindungan pada agama non-Islam yang bersedia menerima mereka dan keluarganya.⁴⁹ Dengan cara ini, pemerintah memang berhasil memangkas pengaruh komunis pada bekas anggota komunis, tetapi di sisi lain pemerintah justru meminimalkan pengaruh gagasan Islam.

Keadaan Muhammadiyah semakin bergejolak pasca Konferensi Kilat dan pengakuan kedudukan dan posisi Muhammadiyah dalam politik kenegaraan yang sejajar dengan partai politik (wajah ganda Muhammadiyah). Hal ini karena fungsi politik riil yang

dijalankan Muhammadiyah mengakibatkan kaburnya garis-garis perjuangan perserikatan dan makin mundurnya misi dakwah Islamiah *amar ma'ruf nahi munkar*, padahal bagi Muhammadiyah fungsi sosial keagamaan itulah yang utama. Pergolakan-pergolakan tersebut menegaskan kedudukan Muhammadiyah sebagai potensi nasional pada umumnya, dan potensi Islam pada khususnya, sehingga Muhammadiyah bermaksud mengadakan tadjid, pembaharuan, pembinaan dan penyempurnaan dalam berbagai aspek hidup terutama dakwah Islamiyah.

Pada 21-26 September 1968 akhirnya diselenggarakan Muktamar Muhammadiyah ke-37 dengan mengusung tema "Meningkatkan Da'wah dan Uchuwah Islamijah, memantapkan perjuangannya dan pembangunan menuju tegaknya keadilan dan kebenaran yang di ridhai Allah Subhanahu Wa Ta'ala". Dalam Muktamar tersebut diputuskan untuk mengadakan tadjid atau pembaharuan bidang Muhammadiyah agar kembali menjadi Gerakan Dakwah Islam, dalam arti yang sebenar-benarnya, antara lain :

- a) Bidang Ideologi/Kejakinan dan tjiat2 hidup.
- b) Bidang Chittah Perjuangannya.
- c) Bidang Gerak dan amal-usaha.
- d) Bidang Organisasi

Disamping itu juga telah memutuskan bahwa sasaran utama operasi Da'wah dari Muhammadiyah ialah "DESA". Keputusan soal ini ialah "PEMBANGUNAN MASJARAKAT DESA" (PEMASA).

Pada tahun 1978, dakwah Islamiyah Muhammadiyah mendapatkan kabar gembira dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 44 Tahun 1978 dan Intruksi Menteri Agama Nomor 9 Tahun 1978.⁵⁰ Keputusan tersebut menyatakan bahwa tidak perlunya perizinan dari yang berwajib bagi pelaksanaan dakwah Islam dan kuliah subuh melalui radio. Selain itu, keputusan ini mengharapkan pelaksanaan dakwah agar mubalig dan mubalighnya benar-benar meningkatkan aktivitas tablignya. Mengingat perkembangan situasi dan kondisi masyarakat, maka persolan dakwah yang perlu diubah bukan hanya mengenai teknik berdakwah, tetapi juga muatan dan tujuannya, termasuk wilayah dakwahnya. Maka paerpaduan orientasi dakwah antara *dakwah billisan* dan dakwah *bilhal* semakin digiatkan oleh Muhammadiyah secara efisien dan efektif. Diantaranya mendirikan panti-panti asuhan Muhammadiyah, bantuan kesehatan melalui Pertolongan Kesengsaraan Umat (PKU), baik melalui rumah sakit, klinik-klinik, maupun rumah-rumah bersalin.

⁴⁷Robert Cribb (ed.), *The Indonesian Killings : Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, (Yogyakarta : Mata Bangsa, 2003), hlm. 73-75.

⁴⁸M.C Ricklefs, *Mengislamkan Jawa : Sejarah Islamisasi di Jawa dan penentangannya dari 1930 Sampai Sekarang*, (Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2013), hlm. 250.

⁴⁹Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, (Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 172-173.

⁵⁰Tim Penyusun Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *op.cit.*, hlm. 262.

Kedua, muncul friksi-friksi keras di tubuh organisasi akibat pertentangan pendapat dan sikap politik, yang berakibat pada rentannya gerakan dan kepemimpinan.⁵¹ Maka untuk memperkuat kelembagaan dan organisasi dalam merespons sejumlah tantangan dan perubahan yang ada, Muhammadiyah melakukan serangkaian penguatan atau penyempurnaan organisasi. Sempurnanya suatu organisasi tergantung dari empat hal.

1. Daya pengikatnya.

Daya pengikat dalam Muhammadiyah adalah “aqidah Islamiyah”, mutu keimanan para anggotanya yang diwujudkan dengan keimanan dengan kesadaran yang sebenarnya, yaitu keimanan yang khalis kepada Allah. Bahwa sudah sewajibnya segala tindakan keberanian, keruhanian, dan kejiwaan selalu didasarkan kepada ridha Allah. Mutu keimanan dari anggota-anggota Muhammadiyah harus ditingkatkan sampai ketinggian positif, aktif, dan kreatif.

2. Pimpinan (Imamahnya).

Perlunya tenaga-tenaga pimpinan Muhammadiyah dikoordinasi dan di *upgrade*, baik dalam arti pengetahuan maupun dalam arti militansinya tidaklah disangsikan lagi. Dalam hubungan perjuangan sekarang ini berarti meng-*upgrade* tenaga-tenaga pimpinan organisasi dalam soal-soal keislaman dan kemasyarakatan, sehingga benar-benar memiliki mental akhlak seorang mukmin dan menjadi Pancasilais sejati, yang mengerti dan memahami doktrin revolusi Indonesia.

3. Pembinaan anggota (kaderisasi).

Perlunya kursus-kursus bagi anggota secara tetap ditingkatkan masing-masing untuk lebih meningkatkan dan menyempurnakan perbekalan dan kemampuan setiap anggota dalam melakukan tugas da'wah Islam dan amar ma'ruf nahi munkar. Inventarisasi dan penggolongan keahlian dan bakat untuk digunakan secara maksimal bagi kepentingan revolusi

4. Administrasi organisasi.

Pemimpin dan tenaga-tenaga kader agar selalu mengadakan diskusi seminar dan sejenisnya yang bertujuan agar selalu mengikuti tanpa keliru terkait soal-soal dalam masyarakat agar terhindar dari melencengnya jalan organisasi.

Ketiga, sikap netral Muhammadiyah terhadap politik. Pengalaman politik Muhammadiyah yang traumatik melalui Partai Masyumi dan Parmusi membawa Muhammadiyah pada suatu kesimpulan penting untuk segera merumuskan pola hubungan dengan politik. Kondisi politik yang hegemonik pada awal dekade 1970-an mengakibatkan partai-partai politik yang eksis sulit menjadi kuat, independen, dan mandiri sebagai akibat dari campur tangan pemerintahan yang dominan. Muhammadiyah

mengambil sikap netral sejak keputusan Mukatamar Muhammadiyah ke-38 di Ujung Pandang yang dikenal dengan *Khittah* Ujung Pandang. *Khittah* Ujung Pandang menegaskan kedudukan Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan dan menunjukkan independensinya dengan memposisikan hubungan yang sama dengan semua partai politik. *Khittah* dirumuskan untuk menjabarkan orientasi umum gerakan dengan tujuan membangun kembali komitmen Muhammadiyah yang telah mengalami kerapuhan akibat berbagai persoalan internal dan eksternal.

Sikap netral Muhammadiyah mengalami problematis ketika Presiden Soeharto dalam pidato kenegaraan Presiden Soeharto tanggal 16 Agustus 1982 mengumumkan masalah asas bagi semua kekuatan sosial politik, bahwa seluruh kekuatan sosial politik baik partai politik maupun organisasi kemasyarakatan sebaiknya hanya mengikatkan diri pada asas Pancasila.⁵² Muhammadiyah memang tidak mempertentangkan Islam dengan Pancasila, namun disisi lain Muhammadiyah memandang pemberlakuan asas tunggal Pancasila bisa menghilangkan jati diri Muhammadiyah sebagai organisasi Islam. Penolakan terhadap pemberlakuan asas tunggal Pancasila tidak memungkinkan, dan jauh tidak memungkinkan lagi bahwa Muhammadiyah harus menghapus asas Islam yang menjadi penyebab lahirnya Muhammadiyah. Di sisi lain, Muhammadiyah yang sejak awal menerima Pancasila sebagai pedoman hidup, membuat Muhammadiyah tetap tunduk dan patuh pada ketentuan perundang-undangan yang diberlakukan sebagaimana di tegaskan dalam Kepribadian Muhammadiyah. Bahwa Muhammadiyah senantiasa mengindahkan hukum, perundang-undangan, peraturan-peraturan, dan dasar falsafah negara yang sah.

Kepribadian Muhammadiyah yang moderat-akomodatif membuat Muhammadiyah tidak tergesa-gesa menerima atau menolak pemberlakuan asas tunggal, tetapi berusaha mengintensifkan lobi dengan bertemu sejumlah pejabat pemerintahan, antara lain Menteri Agama, Menteri Dalam Negeri, Menteri Muda Sekretaris Kabinet, Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat, Menteri Koordinator Politik dan Keamanan serta Presiden. Selain itu, Muhammadiyah juga mengadakan pertemuan dengan NU dan PPP, dengan MUI dan Wadah Masyarakat Antar Umat Beragama, serta KAHMI JAYA. Dalam hal ini PP Muhammadiyah bertindak cepat mengejar penyusunan RUU yang sedang disiapkan pemerintah berharap usulan Muhammadiyah dicantumkan sehingga asas Islam yang menjadi asas Muhammadiyah dapat dipertahankan.⁵³

⁵¹Haedar Nashir, *Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah*, (Yogyakarta : BIGRAF Pub, 1999), hlm. 52.

⁵²Tim Redaksi, “Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1982 : Parpol Sebaiknya Hanya Ikatkan Diri Pada Asas Pancasila”, *Suara Muhammadiyah*, Tahun 82, No. 17/62, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1983), hlm. 9.

⁵³*Ibid.*, hlm. 3-7.

Pada 4 April 1985 diadakan rapat pleno PP Muhammadiyah yang melaporkan hal-hal yang telah diperjuangkan oleh Muhammadiyah secara maksimal sampai saat itu. PP Muhammadiyah juga melaporkan bahwa tidak ada satupun fraksi di DPR yang bersedia membicarakan masalah asas. Pancasila sebagai satu-satunya asas bagi ormas tidak dapat ditawarkan lagi dan akan masuk dalam UU tentang organisasi kemasyarakatan. Pada 25 Mei 1985 pukul 11.35, dengan suara bulat Panitia Khusus (Pansus) yang diketuai Suhardiman menyetujui RUU tersebut dan mengesahkannya menjadi UU.⁵⁴ Sesuai dengan perkembangan tersebut, setelah melalui pembicaraan yang cukup panjang maka akhirnya PP Muhammadiyah menyusun 4 usul guna penyempurnaan dan menerima RUU Keormasan No.5/1985 tertanggal 16 April 1985. Sumbangan pemikiran Muhammadiyah untuk memperbaiki UU Keormasan, menurut Suhardiman, sekitar 75-80% tertampung dalam UU yang dimaksud.

Selain alasan-alasan taktik, strategi, politik, penerimaan Muhammadiyah atas asas tunggal Pancasila merupakan bagi bagian dari pemahaman Tauhid. Muhammadiyah merupakan organisasi paling akhir yang menerima asas Pancasila yakni Desember 1985. Muhammadiyah tidak masalah menjadikan Pancasila sebagai dasar organisasi. Namun, Muhammadiyah tidak bergerak dengan motivasi Pancasila, melainkan karena Islam. Dengan mencantumkan Pancasila dimaksudkan agar gerak Muhammadiyah tidak keluar dari Pancasila. Penerimaan Muhammadiyah terhadap asas Pancasila diistilahkan sebagai "Politik Helm", helm demi keselamatan dan tiket yang sah agar bisa berjalan dengan baik.

KESIMPULAN

Majalah *Suara Muhammadiyah* lahir sebagai bentuk kesadaran Kyai Haji Ahmad Dahlan, pendiri Muhammadiyah bahwa dakwah *amar ma'ruf nahi munkar* dapat dilakukan melalui berbagai media, salah satunya adalah media cetak. Sebagai organ resmi Muhammadiyah, majalah *Suara Muhammadiyah* memiliki peranan yang sangat penting sebagai saluran komunikasi berkala untuk menghubungkan Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan wilayah, daerah, cabang, dan ranting. Selain itu, *Suara Muhammadiyah* juga membawa pendapat dan pikiran, pandangan dan sikap, serta berita politik yang kesemuanya itu merupakan bentuk *Suara Muhammadiyah* dalam memainkan perannya untuk perjuangan politik Muhammadiyah. Dengan harapan mampu melaksanakan pembinaan persatuan dan kesatuan suara umat Islam dalam memenangkan kepentingan umat Islam dalam bermasyarakat dan bernegara.

Politik sebagai bagian dari dakwah memposisikan Muhammadiyah sebagai kelompok kepentingan. Muhammadiyah tidak bergerak dalam dunia politik praktis seperti partai politik. Namun mengembangkan fungsi sebagai kelompok kepentingan yang efektif melalui berbagai saluran atau media untuk memainkan peranan politik secara aktif dan strategis dengan melakukan kegiatan-kegiatan politik secara tidak langsung (*high politic* dalam pandangan Amien Rais, *allocative politic* dalam pandangan Din Syamsudin) yang bersifat mempengaruhi kebijakan negara dengan perjuangan moral untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat masyarakat dan negara, sebagaimana dilakukan oleh kelompok-kelompok kepentingan. Pertimbangannya sesuai dengan prinsip dakwah Islam *amar ma'ruf nahi munkar* dalam menentukan arah perjalanan bangsa dan negara, sehingga tidak menarik diri terhadap politik yang pada akhirnya dikhawatirkan bahwa proses dan sistem kehidupan politik ditentukan oleh kekuatan-kekuatan lain yang dimungkinkan tidak sejalan dengan kepentingan umat Islam dan kemaslahatan bangsa.

Haluan dasar Muhammadiyah memposisikan dirinya sebagai gerakan kultural dengan ruang gerak sekaligus, yaitu melakukan amal kemanusiaan dengan pembinaan masyarakat secara langsung, sekaligus melakukan amal kenegaraan secara tidak langsung dengan mempengaruhi kebijakan. Arah baru dari haluan dasar yang telah dirumuskan dan disahkan dalam implementasinya bejalan kurang signifikan. Oleh karena itu, Muhammadiyah segera mengubah arah haluan dengan langkah-langkah strategis yang menjanjikan dan dibutuhkan.

Perubahan politik Muhammadiyah itu bukanlah soal benar dan salah, tetapi pilihan tersebut merupakan pilihan taktis dan strategi, sepanjang dapat memberikan keuntungan bagi perwujudan tujuan organisasi. Pilihan menjadi partisipan ataupun sikap netral partai bukanlah tanpa pertimbangan dan perhitungan politik. Dengan kata lain, pilihan kembali kepada *khittah* yang berorientasi sosio-kultural dan menyatakan netral terhadap semua partai politik merupakan pilihan yang didasarkan pada perhitungan-perhitungan politik yang jelas. Perubahan politik itu juga didasarkan pada kecenderungan kekuasaan. Semula Muhammadiyah memandang perubahan rezim Orde Lama ke Orde Baru merefleksikan semangat umum warga negara, demokrasi segera tumbuh, kebebasan berpartai segera diwujudkan, sistem politik dibenahi, birokrasi di reformasi dan artikulasi politik warga pada ranah publik dilindungi konstitusi. Namun, apa yang dipikirkan dan diharapkan oleh kalangan umat Islam termasuk Muhammadiyah terhadap pemerintahan yang baru ternyata bertolak belakang. Dalam perkembangannya, Orde Baru justru muncul sebagai kekuatan yang sangat dominan. Kebebasan berekspresi dibatasi, independensi partai dirampas, dan sistem politik yang diciptakan justru mempermulus terbentuknya "Demokrasi Terpimpin" model baru.

⁵⁴Tim Redaksi, "RUU Disahkan DPR-RI jadi UU", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 85, No. 12/65, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1985), hlm. 14.

DAFTAR PUSTAKA

Arsip dan Terbitan Resmi

Ahmad Basuni, H., "46 Tahun Suara Muhammadiyah dan 1 Tahun Wadjah dan Gaja Baru", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 46, No. 15-16, 1966, (Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1966.

_____, "Pers Usaha Muhammadiyah : KHA Dahlan Prakarsai Terbitkan Suara Muhammadiyah", *Suara Muhammadiyah*, Tahun ke 64, No. 5 Maret I 1984, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1984.

_____, "65 Tahun Suara Muhammadiyah, SM Pers Tertua dan Lestari, KHA Dahlan Juga Seorang Wartawan", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 65, No. 4, 1985, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1985.

Asfan Amin Putera, "Penjelesaian G30S Dibidang Militer dan Politik", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 37, No. 7-8, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1965.

Menteri/Pangad Mayor Jenderal Soeharto, *Tugas Kita Bersama Menghantjurkan Keratjunan dari Kontrev G30S/PKI*, *Suara Muhammadiyah*, Tahun 38, No. 1-2, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1965.

PP Muhammadiyah, *Laporan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Periode 1965-1968 Kepada Mu'ktamar Muhammadiyah Ke 37 Pada 21-26 September 1968 di Jogjakarta*,

_____, *Surat Pemberitahuan Tentang Keberadaan Organisasi Muhammadiyah : Data Organisasi Kemasyarakatan No. A/6-266/1987*.

Tan Lelana, "Perombakan PP Partai Muslimin, *Suara Muhammadiyah*, Tahun 50, No. 17-18, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1970.

Tim Redaksi, "Laporan PP Muhammadiyah : Dari Mu'tamar ke Tanwir, Masalah Organisasi dan Politiknya (II)", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 38, No. 13-14, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1966.

_____, "Situasi Tanah Air : Pilih Presiden Baru Tjalon2 : Hatta, Sultan, Nasution", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 38, No. 10, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1966.

_____, "Sikap Muhammadiyah Terhadap Pembentukan Partai Muslimin Indonesia", *Suara Muhammadiyah*, Tahun XLVII, No. 16, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1967.

_____, "Pernyataan PP Muhammadiyah Terhadap Diakui Berdirinja Partai Muslimin Indonesia", *Suara Muhammadiyah*, Tahun XLVIII, No. 5, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1968.

_____, "Keputusan Sidang Tanwir Muhammadiyah Th. 1969 Di Ponorogo", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 50, No. 3, 1970, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1970.

_____, "Malam Setengah Abad Suara Muhammadiyah", *Suara Muhammadiyah*, Tahun ke-50, No.3, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1970.

_____, "Tajuk Rencana : Berjumpa di Mu'tamar Surabaya", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 58, No. 12, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1978.

_____, "Pidato Kenegaraan 17 Agustus 1982 : Parpol Sebaiknya Hanya Ikatkan Diri Pada Asas Pancasila", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 82, No. 16/62, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1982.

_____, "RUU Disahkan DPR-RI jadi UU", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 85, No. 12/65, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1985.

Tirtodiningrat, "Larangan Komunisme di Indonesia", *Suara Muhammadiyah*, Tahun 47, No. 11-12, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1967.

Widagdo, S.S, "Peranan Suara Muhammadiyah dalam Muhammadiyah", *Suara Muhammadiyah*, Tahun Ke 38, No. 1 & 2 Januari 1966, Yogyakarta : Taman Pustaka Muhammadiyah, 1966.

Buku

Arifin, MT., *Muhammadiyah Potret Yang Berubah*, Surakarta : Institut Gelanggang Pemikiran Filsafat Sosial Budaya dan Kependudukan, 1990.

Cribb, Robert., (ed.), *The Indonesian Killings : Pembantaian PKI di Jawa dan Bali 1965-1966*, Yogyakarta : Mata Bangsa, 2003.

- Daliman, A., *Metode Penelitian Sejarah*, Yogyakarta : Ombak, 2012.
- Dudung Abdurahman, *Metode penelitian Sejarah*, Jakarta : Logos Wacana Ilmu, 1999.
- Haedar Nashir, *Revitalisasi Gerakan Muhammadiyah*, Yogyakarta : BIGRAF Pub, 1999.
- Helius Sjamsuddin, *Metodologi Sejarah*, Yogyakarta: Ombak, 2012.
- Kuntowijoyo, *Pengantar Ilmu Sejarah*, Yogyakarta, Tiara Wacana, 2013.
- Mu'arif, *Benteng Muhammadiyah: Sepenggal Riwayat dan Pemikiran Haji Fachrodin 1890-1929*, Yogyakarta : Suara Muhammadiyah, 2010.
- Muhammad Kamal Hassan, *Modernisasi Indonesia : Respons Cendekiawan Muslim*, Jakarta : Lingkaran Studi Indonesia Ciputat, 1987.
- Ricklefs, M.C., *Mengislamkan Jawa : Sejarah Islamisasi di Jawa dan penentangannya dari 1930 Sampai Sekarang*, Jakarta : Serambi Ilmu Semesta, 2013.
- Sartono Kartodirdjo, *Pengantar Sejarah Indonesia Baru, Dari Kolonialisme Sampai Nasionalisme Jilid 2*, Jakarta : Gramedia Pustaka Utama, 1992.
- Syaifullah, *Gerak Politik Muhammadiyah Dalam Masyumi*, Jakarta : Gafiti Pers, 1997.
- Syarifuddin Jurdi, *Muhammadiyah Dalam Dinamika Politik Indonesia 1966-2006*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2010.
- _____, *Pergeseran Politik Muhammadiyah*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 2015.
- Taufik Rahman, *Tanah Ai Bahasa: Seratus Jejak Pers Indonesia*, Jakarta : I BOEKOE, 2007.
- Tim Penyusun Majelis Diktilitbang dan LPI PP Muhammadiyah, *1 Abad Muhammadiyah, Gagasan Pembaruan Sosial Keagamaan*, Jakarta : Buku Kompas, 2010.
- Widodo, *Teknik Wartawan Menulis Berita di Surat Kabar dan Majalah*, Surabaya : Indah, 1997.
- Jurnal**
Mu'arif, "Surat Kabar : Officieel Orgaan", *Majalah Basis*, No. 1-2, Tahun Ke-60, Yogyakarta : Yayasan BP Basis, 2011.